

**TAFSIR AL-AZHAR SEBAGAI COUNTER-DISCOURSE:
Hermeneutika HAMKA dalam Rezim Pengetahuan Orde Lama**



Oleh:

Ahmad Avif Okjilshipia

NIM: 22200012002

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh

Gelar Master of Arts (M.A.)

Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi Hermeneutika Al-Qur'an

Yogyakarta

2026



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-94/Un.02/DPPs/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : TAFSIR AL-AZHAR SEBAGAI COUNTER-DISCOURSE: Hermeneutika HAMKA dalam Rezim Pengetahuan Orde Lama

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD AVIF OKJILSHIPIA, S.Ag.
Nomor Induk Mahasiswa : 22200012002
Telah diujikan pada : Selasa, 13 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Dr. Akmal Ihsan
SIGNED

Valid ID: 69722b1514d32



Pengaji II

Dr. Munirul Ikhwan
SIGNED

Valid ID: 696dfbd7b9a67



Pengaji III

Dr. Phil. Mu'ammar Zayn Qadafy, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6973158ac9983



Yogyakarta, 13 Januari 2026

UIN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 697321f509680

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Avif Okjilshipia
NIM : 22200012002
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Hermeneutika Al-Qur'an

Menyatakan bahwa naskah tesis berjudul "**TAFSIR AL-AZHAR SEBAGAI COUNTER-DISCOURSE: Hermeneutika HAMKA dan Rezim Pengetahuan Orde Lama**", yang saya ajukan secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian/karya ilmiah yang saya tulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian kutipan asli yang dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 22 Desember 2025

Yang menyatakan,



Ahmad Avif Okjilshipia

NIM: 22200012002

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Avif Okjilshipia
NIM : 22200012002
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Hermeneutika Al-Qur'an

Menyatakan bahwa naskah tesis berjudul "**TAFSIR AL-AZHAR SEBAGAI COUNTER-DISCOURSE: Hermeneutika HAMKA dan Rezim Pengetahuan Orde Lama**" secara keseluruhan saya tulis sendiri dan benar-benar bebas dari plagiasi. Apabila di kemudian hari ternyata dibuktikan bahwa karya ini tidak orisinal (mengandung plagiasi), maka saya siap untuk ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 22 Desember 2025

Yang menyatakan,



Ahmad Avif Okjilshipia

NIM: 22200012002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth..

Direktur Program Pascasarjana

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul: "**TAFSIR AL-AZHAR SEBAGAI COUNTER-DISCOURSE: Hermeneutika HAMKA dan Rezim Pengetahuan Orde Lama**", yang ditulis oleh:

Nama	:	Ahmad Avif Okjilshipia
NIM	:	22200012002
Jenjang	:	Magister
Program Studi	:	Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi	:	Hermeneutika Al-Qur'an

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Master of Arts (M.A.)

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 22 Desember 2025

Pembimbing,



Dr. Munirul Ikhwan, M.A.

ABSTRAK

Tesis ini menganalisis *Tafsir Al-Azhar* karya HAMKA sebagai praktik produksi pengetahuan yang beroperasi dalam konfigurasi kuasa dan rezim pengetahuan negara pada masa Demokrasi Terpimpin (1959–1966). Berangkat dari kritik terhadap kecenderungan kajian tafsir sebelumnya yang membaca *Tafsir Al-Azhar* terutama sebagai karya moral-etis, modernis, atau metodologis, penelitian ini mengajukan pembacaan alternatif dengan menempatkan tafsir tersebut sebagai *counter-discourse* terhadap upaya negara Orde Lama memonopoli horizon kebenaran publik melalui proyek ideologis Nasakom dan Manipol/USDEK. Fokus utama penelitian ini bukan pada validitas teologis tafsir, melainkan pada bagaimana teks keagamaan berfungsi sebagai wacana yang dinegosiasi, diproduksi, dan dijalankan dalam relasi kuasa tertentu.

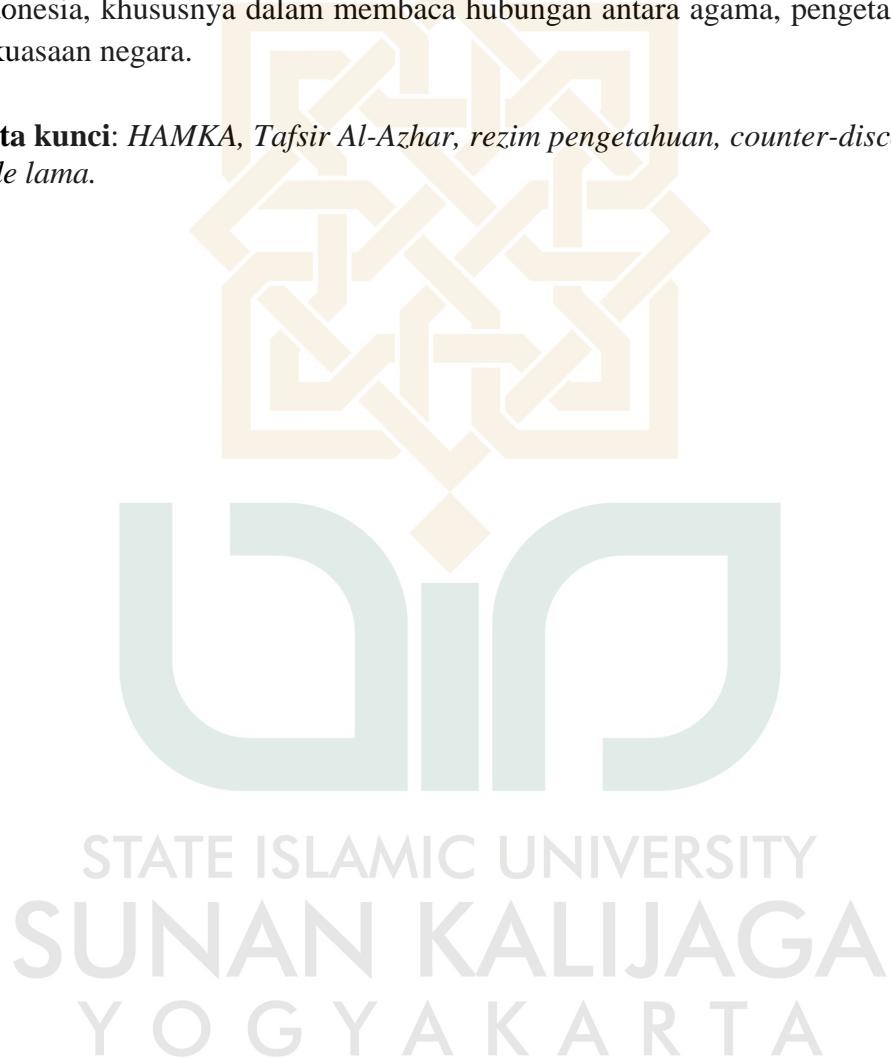
Penelitian ini menggunakan pendekatan genealogis-wacana Michel Foucault dengan metode kualitatif-interpretatif. Kerangka teoritis yang digunakan mencakup konsep diskursus, rezim pengetahuan, genealogi, dan *counter-discourse* untuk menelusuri hubungan antara teks tafsir, subjektivitas penafsir, dan mekanisme pengendalian wacana negara. Data utama penelitian adalah *Tafsir Al-Azhar*, yang dilengkapi dengan karya-karya non-tafsir HAMKA serta literatur historis dan teoretis mengenai politik Orde Lama dan relasi agama–negara. Analisis dilakukan melalui identifikasi pernyataan kunci, pemetaan genealogis terhadap pengalaman sosial-politik HAMKA, penyandingan wacana tafsir dengan wacana resmi negara, serta penentuan fungsi diskursif teks dalam medan kuasa yang membingkainya.

Tesis ini mengembangkan argumen bahwa *Tafsir Al-Azhar* tidak dapat dipahami secara memadai jika dilepaskan dari konteks rezim pengetahuan Orde Lama. Tafsir ini beroperasi sebagai *counter-discourse* yang tidak tampil sebagai oposisi politik eksplisit, tetapi mengintervensi klaim negara atas kebenaran melalui strategi diskursif yang bersifat etis dan epistemik. Penelitian ini menunjukkan bahwa kritik HAMKA terhadap penyalahgunaan kekuasaan, penegasan tanggung jawab moral individu, dan pemindahan sumber legitimasi kebenaran dari negara kepada Tuhan berfungsi sebagai mekanisme delegitimasi simbolik terhadap hegemoni epistemik negara.

Temuan utama penelitian ini mencakup tiga poin. Pertama, Orde Lama dipahami bukan sekadar sebagai rezim politik, melainkan sebagai rezim pengetahuan yang mengatur kemungkinan produksi dan legitimasi wacana publik, termasuk wacana keagamaan. Kedua, subjektivitas hermeneutis HAMKA terbentuk melalui proses genealogis yang melibatkan jaringan reformisme Islam, pengalaman organisasi, pembungkaman media, dan penahanan politik, yang secara langsung memengaruhi orientasi tafsirnya. Ketiga, *Tafsir Al-Azhar* berfungsi

sebagai praktik produksi pengetahuan alternatif yang bekerja dari dalam batas-batas pengawasan negara, tetapi tidak sepenuhnya tunduk pada logika ideologisnya. Dengan demikian, tesis ini berkontribusi pada pengembangan studi tafsir Al-Qur'an dengan menunjukkan bahwa tafsir dapat dianalisis sebagai praktik diskursif yang berkelindan dengan relasi kuasa dan pembentukan subjektivitas. Pendekatan genealogis-wacana yang digunakan dalam penelitian ini membuka kemungkinan metodologis baru bagi kajian tafsir, politik Islam, dan sejarah intelektual Islam Indonesia, khususnya dalam membaca hubungan antara agama, pengetahuan, dan kekuasaan negara.

Kata kunci: *HAMKA, Tafsir Al-Azhar, rezim pengetahuan, counter-discourse, orde lama.*



MOTTO



حَيْرُكُمْ مَنْ تَعْلَمَ الْقُرْآنَ وَعَلَمَهُ

“Sebaik-baik di antara kalian adalah yang mempelajari al-Qur'an dan mengajarkannya”

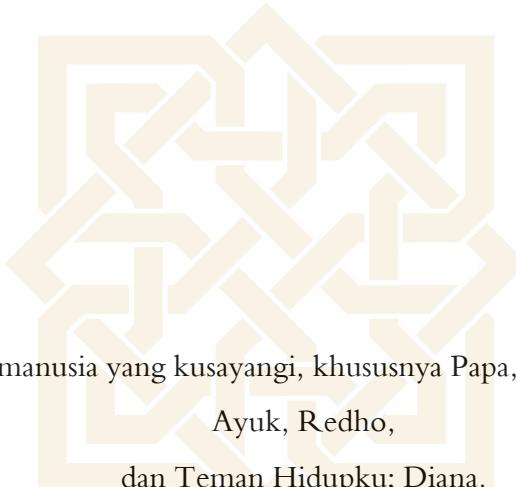
حَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya”

Aku yakin, mempelajari al-Qur'an membuat seseorang menjadi lebih mengerti bagaimana menjadi manusia yang baik, bukan membuat seseorang merasa lebih baik dari manusia lainnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN



Teruntuk semua manusia yang kusayangi, khususnya Papa, Mama, Kak Novta serta
Ayuk, Redho,
dan Teman Hidupku; Diana.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mengajarkan manusia dengan segala kemurahan hati-Nya. Salawat dan salam tercurah pada Muhammad (s.a.w.), Nabi yang menyampaikan wahyu, yang menjadi contoh untuk menjadi sebaik-baik manusia.

Perkuliahan yang berlangsung sejak awal 2022, hingga penelitian yang tuntas pada akhir 2025 adalah proses yang dilalui berkat bantuan, dukungan, dan doa dari segenap pihak yang tak memungkinkan untuk disebutkan satu persatu. Pihak-pihak yang memiliki andil besar bagi penulis di antaranya:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ketua dan Sekretaris Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Dr. Munirul Ikhwan, sebagai Dosen Penasihat Akademik, yang juga merupakan Dosen Pembimbing dalam segenap proses penelitian dan penulisan tugas akhir. Bagi penulis, beliau adalah mentor akademik yang berperan besar dalam pembentukan cara pandang, sikap kritis, hingga minat penelitian dan karir di dunia akademik.
5. Seluruh dosen pengampu mata kuliah pada program *Interdisciplinary Islamic Studies* yang membagikan pengetahuan dan pengalamannya di dalam perkuliahan-perkuliahan pada konsentrasi Hermeneutika Al-Qur'an.
6. Segenap guru yang mengajar, membimbing, dan memberi inspirasi, sedari penulis kecil hingga dewasa.
7. Keluarga di Kedaton Bandar Lampung, Bapak Dr. Septuri M.Ag., Ibu Yulianah, Kakakku Ahmad Novta Sebad Linaci M.Pd. serta Ayuk Laila, dan Adikku Ahmad Redho Qurrota A'yun S.Pd.
8. Mardiana Pungki, S.Hum., yang telah menemani dari waktu ke waktu, yang membantu penulis melewati banyak kesulitan, yang bersedia untuk terus

menyaksikan ‘proses’ penulis dari sisi yang paling dekat. Terima kasih atas kehadirannya sejak 2018.

9. Keluarga di Manisrenggo. Bapak Mujiyono, Ibu Kustiyantini, dan Mas Irfan Ramadani yang dengan kelapangan hatinya menerima seorang perantau dari Lampung untuk menjadi bagian dari keluarga kecil mereka.
10. Seluruh keluarga di Lampung Barat, Palembang, Pesawaran, hingga Tangerang, yang menyaksikan dan mendukung tumbuh kembang penulis, sejak sekolah diantar Papa hingga merantau di Yogyakarta.
11. Teman-teman seangkatan di konsentrasi Hermeneutika Al-Qur'an yang sebagian besar telah lulus lebih dahulu. Diskusi dan interaksi kita di kelas banyak berpengaruh dalam kerangka pemikiran penulis.
12. Teman-teman dan murid-murid penulis di Kinderstation School, khususnya di TK Jakal yang banyak memberi dukungan. Ungkapan seperti “semoga lancar penelitiannya!”, “sukses ya ujiannya, Mr. Okjil!” bukan sekedar kata-kata. Bagi penulis ungkapan-ungkapan itu mengandung energi yang sangat membantu dan membangun.
13. Teman-teman di Komunitas Standupindo Jogja yang dengan tulus banyak berbagi tawa dan canda dalam setiap obrolan.
14. Seluruh pihak yang tidak disebut satu per satu, yang tentu juga memiliki banyak andil dalam hidup penulis. Terima kasih banyak.

Kata pengantar ini ditutup dengan harapan semoga Tesis yang dalam prosesnya melibatkan banyak pihak ini bermanfaat bagi segenap pembaca. Penulis sadar bahwa tulisan ini masih menyisakan celah-celah yang membuatnya masih jauh dari kategori karya yang baik. Terima kasih atas segala penghargaan, kritik, saran, dan masukan dari para pembaca di kemudian hari. Sampai jumpa pada karya berikutnya. *Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 17 Januari 2025

Penulis,



Ahmad Avif Okjilshipia

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I:	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Signifikansi	10
D. Tinjauan Pustaka	13
E. Kerangka Teoritis.....	20
F. Metode Penelitian	25
G. Sistematika Pembahasan	27
BAB II:	
HAMKA DALAM JARINGAN WACANA DAN KEKUASAAN	31
A. Akar Pembentukan Intelektual HAMKA.....	34
B. Jejaring Sosial dan Aktivisme HAMKA.....	40
C. Dari Pengalaman Politik ke Tafsir	44
BAB III:	
REZIM PENGETAHUAN ORDE LAMA: STRUKTUR DAN KONDISI EPISTEMIKNYA	49
A. Arsitektur Rezim Pengetahuan Orde Lama	52
B. Mekanisme Pengendalian Wacana Keagamaan dan Politik	57
C. Posisi HAMKA dalam Struktur Kuasa	61
D. Celah-Celah Epistemik dalam Rezim Pengetahuan Orde Lama.....	65

BAB IV:.....	
TAFSIR AL-AZHAR SEBAGAI COUNTER-DISCOURSE	73
A. <i>Tafsir Al-Azhar</i> dalam Rezim Pengetahuan Orde Lama.....	75
1. Melampaui Kategori “Kontra Revolusi”	76
2. Independensi Material dalam Produksi Tafsir	79
3. Paradoks: Kemunculan Tafsir dari Dalam Penjara	84
B. Produksi Wacana Tandingan dalam <i>Tafsir Al-Azhar</i>	89
1. Kedaulatan Ilahi vs Absolutisme Pengetahuan Negara	90
2. Transparansi Kebenaran vs Kooptasi Pengetahuan Negara.....	95
3. Kritik dan Delegitimasi Moral terhadap Kolaborator Kekuasaan....	102
C. Sintesis: Tafsir sebagai <i>Counter-Discourse</i>	108
BAB V:	
PENUTUP.....	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA.....	118



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tafsir Al-Azhar disusun dalam konteks ketika negara di bawah Presiden Sukarno berupaya membangun suatu horizon ideologis tunggal melalui Nasakom dan Manipol/USDEK.¹ Pada masa Demokrasi Terpimpin (1959–1965), negara tidak hanya memperketat kontrol politik, tetapi juga membentuk tatanan pengetahuan yang mengatur siapa yang berhak berbicara, apa yang dapat dikatakan, dan bagaimana kebenaran harus dipahami di ruang publik.² Dalam lanskap seperti ini, produksi wacana keagamaan berada dalam orbit pengawasan negara dan semakin dipersempit ruang artikulasinya bagi aktor atau organisasi yang tidak sesuai dengan garis ideologi resmi. Keadaan tersebut membentuk medan epistemik tempat *Tafsir Al-Azhar* ditulis sekaligus menandai batas-batas yang harus dinegosiasikan oleh HAMKA sebagai penulisnya.

¹ Manipol/USDEK merupakan paket ideologi negara yang ditetapkan Presiden Sukarno pada 1959 melalui pidatonya *Penemuan Kembali Revolusi Kita*, dan kemudian disahkan MPRS sebagai dasar politik negara. Manipol (Manifesto Politik) dirumuskan sebagai garis besar haluan negara, sedangkan USDEK—akronim dari *UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin*, dan *Kepribadian Indonesia*—menjadi lima prinsip yang wajib diikuti seluruh institusi politik. Para sejarawan seperti Herbert Feith dan Rex Mortimer menegaskan bahwa Manipol/USDEK berfungsi sebagai ideologi resmi yang mengatur batas wacana politik, memaksa setiap organisasi untuk menyesuaikan diri, dan memberlakukan pembatasan terhadap kelompok yang dianggap tidak sejalan, termasuk Masyumi dan arus Islam modernis. Lihat Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia* (Ithaca: Cornell University Press, 1962), 518–520; Rex Mortimer, *Indonesian Communism under Sukarno: Ideology and Politics, 1959–1965* (Ithaca: Cornell University Press, 1974), 67–70.

² Krishna Sen dan David T. Hill, *Media, Culture and Politics in Indonesia* (Jakarta: Equinox Publishing, 2006), 34–37.

Konsolidasi ideologi negara melalui Nasakom dan Manipol/USDEK dapat dibaca sebagai pembentukan rezim pengetahuan, yakni konfigurasi diskursif dan institusional yang mengatur kemungkinan produksi, sirkulasi, dan pengakuan pengetahuan dalam ruang publik.³ Melalui perangkat ini, negara tidak terutama berfungsi sebagai penentu kebenaran, melainkan sebagai pengelola medan epistemik yang menentukan apa yang dapat dipikirkan dan diucapkan secara sah, bagaimana persoalan politik dapat dirumuskan, serta posisi subjek mana yang diakui sebagai otoritatif. Rezim ini beroperasi melalui mekanisme klasifikasi ideologis, normalisasi bahasa politik, dan pengaturan institusional yang memaksa organisasi-organisasi kemasyarakatan—termasuk kelompok Islam modernis—untuk menyesuaikan diri dengan horizon wacana negara. Dengan demikian, kekuasaan negara tidak hanya dimanifestasikan dalam kontrol politik, tetapi juga dalam upaya memusatkan produksi pengetahuan agar selaras dengan konfigurasi ideologis yang ditetapkannya.⁴

Kelompok Islam modernis yang memiliki kedekatan historis dengan Masyumi merupakan salah satu aktor yang terdampak paling signifikan. Kritik

³ Dalam tesis ini, istilah *rezim pengetahuan* digunakan sebagai konsep operasional yang mengintegrasikan beberapa istilah kunci Foucauldian yang bekerja pada level berbeda. *Discourse* dipahami sebagai praktik ujaran yang memproduksi objek, subjek, dan makna; sementara relasi *power/knowledge* menjelaskan bahwa produksi pengetahuan selalu terikat pada relasi kuasa. Pada level struktural, *régime de savoir* menunjuk pada aturan dan kondisi kemungkinan yang menentukan jenis pengetahuan apa yang dapat diproduksi dan dipikirkan, sedangkan *régime de vérité* merujuk pada mekanisme institusional dan normatif yang menetapkan pengetahuan mana yang diakui sebagai benar dan sah. Istilah *rezim pengetahuan* dalam tesis ini tidak dimaksudkan sebagai padanan tunggal salah satu istilah tersebut, melainkan sebagai konsep payung untuk menunjuk konfigurasi diskursif-institusional konkret di mana negara mengelola produksi, sirkulasi, dan legitimasi pengetahuan dalam ruang publik. Dengan pengertian ini, rezim pengetahuan menegaskan bagaimana kuasa bekerja bukan terutama melalui represi langsung, melainkan melalui normalisasi cara mengetahui, sekaligus menjelaskan mengapa *Tafsir Al-Azhar* dapat dibaca sebagai *counter-discourse* yang beroperasi di luar logika epistemik negara.

⁴ Michel Foucault, *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972–1977*, ed. Colin Gordon (New York: Pantheon Books, 1980), 109–133.

mereka terhadap komunisme, keberatan terhadap kebijakan politik Sukarno, serta orientasi keagamaan yang berbeda sering dibaca sebagai sikap oposisi. Pembubaran Masyumi pada tahun 1960 dan pengawasan ketat terhadap tokoh-tokohnya menunjukkan bagaimana negara berusaha menghilangkan pusat otoritas pengetahuan keagamaan yang dianggap berpotensi mengganggu narasi resmi.⁵ Tindakan-tindakan tersebut bukan hanya bentuk represi politik, tetapi juga intervensi epistemik untuk melemahkan kanal-kanal produksi wacana alternatif.

Dalam konteks ini, proses penulisan *Tafsir Al-Azhar* perlu dilihat sebagai bagian dari dinamika kuasa yang membungkai ruang ekspresi keagamaan pada masa Demokrasi Terpimpin. *Tafsir* tersebut tidak dapat dibaca sebagai respons spontan terhadap kondisi politik, tetapi sebagai teks yang lahir di tengah struktur pengetahuan yang berupaya menutup kemungkinan bagi artikulasi nilai-nilai moral dan keagamaan yang tidak selaras dengan proyek ideologis negara. Dengan demikian, konteks ini menyediakan landasan penting untuk menganalisis bagaimana sebuah karya keagamaan beroperasi, bertahan, atau bahkan menawarkan horizon etis alternatif di dalam rezim pengetahuan yang menuntut keseragaman wacana.

Penggunaan konsep *counter-discourse* dari Michel Foucault dalam penelitian ini berfungsi sebagai perangkat analitis untuk menelaah bagaimana

⁵ Pembubaran Masyumi merupakan bagian dari upaya negara membungkam oposisi Islam modernis. Sukarno menuduh Masyumi terlibat dalam PRRI, meskipun banyak anggotanya tidak terlibat langsung. Lihat Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2000), 265–270; serta Howard M. Federspiel, *Popular Indonesian Literature of the Qur'an* (Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, 1994), 43–45.

Tafsir Al-Azhar memproduksi bentuk-bentuk pengetahuan yang tidak sepenuhnya dapat diserap ke dalam kerangka ideologi negara.⁶ Penekanan HAMKA terhadap tanggung jawab moral individu, bahaya penyalahgunaan kekuasaan, serta kebebasan berpikir dapat dibaca sebagai artikulasi etis yang memiliki relevansi langsung dengan kondisi epistemik masa itu. Unsur-unsur tersebut tidak diasumsikan sebagai representasi resistensi politis, tetapi diposisikan sebagai indikator adanya gesekan antara horizon pengetahuan yang dibangun negara dan horizon etis yang diekspresikan melalui tafsir.

Pembredelan *Panji Masyarakat* pada tahun 1960 memperlihatkan bagaimana negara mengintervensi media sebagai apparatus produksi kebenaran.⁷ Melalui tindakan ini, negara memutus kanal wacana Islam modernis yang selama ini menjadi ruang artikulasi bagi gagasan moral dan sosial keagamaan. Bersamaan dengan pembubaran Masyumi,⁸ tindakan tersebut memperjelas bahwa negara berupaya menata ulang lanskap epistemik dengan menyingkirkan institusi-institusi yang berpotensi menghadirkan otoritas

⁶ Konsep *counter-discourse* dalam Foucault merujuk pada wacana yang muncul dari kelompok yang ditindas atau dibungkam, sebagai respons terhadap dominasi wacana resmi. Dalam kasus HAMKA, tafsir menjadi medium untuk memproduksi kebenaran alternatif terhadap kebenaran yang dipaksakan melalui ideologi negara. Lihat Michel Foucault, *Society Must Be Defended* (New York: Picador, 2003), 7–10; bandingkan dengan Herman Westerink, “Thinking Spirituality Differently: Michel Foucault on Spiritual Self-Practices, Counter-Conducts, and Power-Knowledge Constellations,” *Religions* 10, no. 2 (2019): 1–12.

⁷ Pembredelan *Panji Masyarakat* dilakukan oleh pemerintah pada Januari 1960 setelah memuat artikel berjudul “Kisah Tuan Dirman”, yang ditafsirkan pemerintah sebagai kritik terselubung terhadap Sukarno. Pembredelan ini menandai intensifikasi kontrol negara terhadap media Islam. Lihat James R. Rush, *Hamka’s Great Story: A Master Writer’s Vision of Islam for Modern Indonesia* (Singapore: ISEAS–Yusof Ishak Institute, 2016), 244–246; lihat juga Howard M. Federspiel, *Popular Indonesian Literature of the Qur’an* (Ithaca, NY: Cornell Modern Indonesia Project, 1994), 45–47.

⁸ Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional*, 265–270; bandingkan dengan John D. Legge, *Sukarno: A Political Biography* (New York: Praeger, 1972), 324–329.

pengetahuan alternatif. Pada titik inilah posisi HAMKA semakin berada dalam orbit pengawasan negara.

Penahanan HAMKA pada tahun 1964, yang dilakukan tanpa proses peradilan formal, merupakan bagian dari mekanisme negara untuk mengisolasi tokoh yang dianggap tidak sejalan dengan arah ideologi resmi.⁹ Penjara dalam kerangka Foucauldian bukan hanya institusi yang membatasi tubuh, tetapi juga apparatus yang berupaya mengendalikan kondisi produksi pengetahuan. Namun, sebagaimana ditunjukkan banyak studi, ruang isolasi dapat memunculkan intensifikasi refleksi dan penulisan.¹⁰ Dalam kasus HAMKA, penjara justru menjadi lokasi penyusunan lanjutan *Tafsir Al-Azhar*, sehingga pengalaman ini berfungsi sebagai kondisi historis yang turut membentuk orientasi epistemik karya tersebut.

Tema-tema seperti moralitas, tanggung jawab individu, dan kritik terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang menonjol dalam tafsir HAMKA tidak dapat dilepaskan dari dinamika pengetahuan yang mengitarinya. Elemen-elemen tersebut bukan sekadar ekspresi moral, melainkan bentuk artikulasi etis yang lahir dari relasi antara subjek dan struktur kuasa yang berupaya mengatur horizon kebenaran publik. Sebagaimana ditegaskan Foucault, praktik etis dapat

⁹ Penahanan HAMKA dilakukan pada tahun 1964 dengan tuduhan subversif yang tidak pernah dibuktikan di pengadilan. Penolakannya terhadap komunisme serta kritiknya terhadap kebijakan politik negara membuat ia diawasi lama oleh aparat keamanan sebelum akhirnya dipenjarakan. Lihat Rush, *Hamka's Great Story*, 248–250; lihat juga Azyumardi Azra, *Islam Substantif* (Bandung: Mizan, 2000), 164–165.

¹⁰ Tentang penjara sebagai situs represi yang secara paradoks melahirkan produksi intelektual, lihat Michel Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, trans. Alan Sheridan (New York: Vintage Books, 1995), 23–30; lihat analisis konteks penulisan tafsir HAMKA dalam Khairudin Aljunied, *Hamka and Islam: Cosmopolitan Reform in the Malay World* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2018), 84–89.

berfungsi sebagai medan counter-conduct yang memungkinkan subjek mengartikulasikan kebenarannya di dalam, tetapi tidak sepenuhnya ditentukan oleh, rezim pengetahuan Negara.¹¹ Dalam konteks HAMKA, orientasi moral ini memperlihatkan bagaimana teks keagamaan dapat bergerak sebagai wacana alternatif tanpa harus mengambil posisi oposisi politik secara langsung, sebagaimana juga ditunjukkan oleh pembacaan Aljunied terhadap transformasi etis dalam karya-karyanya.¹²

Kajian akademik sebelumnya lebih banyak menempatkan *Tafsir Al-Azhar* dalam kerangka moral-etic, modernisme, atau metodologi penafsiran. Karya Howard M. Federspiel, *Popular Indonesian Literature of the Qur'an*, misalnya, menyoroti fungsi tafsir ini dalam memperkuat rasionalitas keagamaan masyarakat modern.¹³ Studi Mun'im Sirry, disertasi Wan Sabri Wan Yusof, serta analisis Milhan Yusuf juga menekankan karakter reformis dan pembaruan metodologis dalam tafsir.¹⁴ Meskipun penting, kajian-kajian tersebut belum menelaah secara sistematis bagaimana struktur kuasa dan konfigurasi pengetahuan Orde Lama membingkai proses produksi dan orientasi wacana dalam *Tafsir Al-Azhar*.

¹¹ Foucault, *Power/Knowledge*, 131–133.

¹² Khairudin Aljunied, *Hamka and Islam*, 145–150

¹³ Howard M. Federspiel membahas posisi *Tafsir Al-Azhar* sebagai literatur Islam populer yang memiliki pengaruh luas tanpa menempatkannya dalam konteks politik Orde Lama. Lihat Federspiel, *Popular Indonesian Literature of the Qur'an*, 55–60.

¹⁴ Lihat Mun'im Sirry, “What's Modern about Modern Tafsir? A Closer Look at Hamka's *Tafsir Al-Azhar*,” dalam *The Qur'an in the Malay-Indonesian World: Context and Interpretation*, ed. Majid Daneshgar, Peter G. Riddell, dan Andrew Rippin (New York: Routledge, 2016), 198–211. Untuk kajian klasik, lihat Wan Sabri Wan Yusof, *Hamka's Tafsir Al-Azhar: Qur'anic Exegesis as a Mirror of Social Change* (PhD diss., Temple University, 1997); Milhan Yusuf, *Hamka's Method of Interpreting the Legal Verses of the Qur'an* (MA thesis, McGill University, 1995).

Sejauh ini, pembacaan mengenai hubungan antara konteks politik Orde Lama dan struktur wacana tafsir masih terbatas. Kajian Khairudin Aljunied, misalnya, menyinggung pengaruh pengalaman politik HAMKA terhadap orientasi etis tafsir, tetapi belum diarahkan pada analisis mendalam mengenai relasi antara teks dan rezim pengetahuan negara.¹⁵ Kekosongan ini menunjukkan adanya kebutuhan metodologis untuk membaca *Tafsir Al-Azhar* melalui pendekatan yang memperhitungkan bukan hanya isi moral dan metode penafsiran, tetapi juga kondisi epistemik yang memungkinkan kemunculannya.

Dalam konteks inilah pendekatan genealogis-wacana dari Michel Foucault menjadi relevan,¹⁶ karena memungkinkan analisis yang menelusuri bagaimana teks keagamaan diproduksi, dibentuk, dan dijalankan dalam relasi kuasa. Studi ini memosisikan *Tafsir Al-Azhar* sebagai teks yang dibentuk oleh ketegangan antara subjektivitas penafsir dan mekanisme politik-epistemik negara pada masa Demokrasi Terpimpin.¹⁷ Perspektif ini memungkinkan penelitian menggabungkan dimensi historis, politik, dan epistemik untuk memahami orientasi wacana yang muncul dalam tafsir.

Tafsir Al-Azhar tidak dapat dipahami secara memadai jika diperlakukan hanya sebagai penafsiran spiritual atas ayat-ayat Al-Qur'an. Ia merupakan

¹⁵ Khairudin Aljunied menekankan peran pengalaman historis dan jaringan transnasional dalam membentuk pemikiran HAMKA, namun tidak menempatkan *Tafsir Al-Azhar* secara eksplisit sebagai wacana tandingan terhadap negara. Lihat Aljunied, *Hamka and Islam*, 82–90.

¹⁶ Metode genealogis—berbasis pada konsep *power/knowledge*, *counter-conduct*, dan *subjectivation*—memberikan perangkat analitis untuk mengungkap bagaimana teks keagamaan berfungsi dalam medan pertarungan kuasa. Untuk pemaparan metodologis, lihat Michel Foucault, *The Archaeology of Knowledge* (New York: Pantheon, 1972), 3–12; serta Foucault, *Society Must Be Defended*, 5–11.

¹⁷ Argumen ini juga didukung oleh karya Herman Westerink yang menunjukkan bagaimana praktik keagamaan tertentu menjadi bentuk *counter-conduct* terhadap rezim kuasa. Lihat Westerink, “Thinking Spirituality Differently,” 4–9.

produk dari kondisi historis ketika negara berupaya mengarahkan produksi wacana publik melalui mekanisme ideologis seperti Nasakom dan pembatasan terhadap kelompok Islam modernis. Dalam kerangka *power/knowledge* Foucault, setiap produksi pengetahuan berada dalam jaringan institusional dan relasi kuasa tertentu.¹⁸ Dengan demikian, analisis terhadap tafsir harus memperhitungkan bagaimana konfigurasi kuasa negara Orde Lama turut membentuk horizon wacana yang muncul di dalamnya.

Pengalaman HAMKA dalam berbagai arena—organisasi modernis, dunia politik nasional, pembredelan media, hingga penahanan—menjadi bagian dari formasi subjektivitas yang relevan bagi pemahaman orientasi penafsirannya.¹⁹ Subjek dalam pandangan Foucault merupakan hasil negosiasi historis, bukan entitas otonom. Karena itu, proses *subjectivation* HAMKA perlu dibaca sebagai rangkaian interaksi antara pengalaman historis dan struktur kuasa yang melingkupinya, yang pada gilirannya mempengaruhi horizon hermeneutis dalam *Tafsir Al-Azhar*.²⁰

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini menempatkan *Tafsir Al-Azhar* sebagai teks yang beroperasi pada tiga lapis analisis: (1) produksi pengetahuan—bagaimana tafsir turut membentuk horizon kebenaran alternatif di tengah rezim pengetahuan negara; (2) subjektivitas penulis—bagaimana

¹⁸ Konsep *power/knowledge* menjelaskan bahwa produksi kebenaran tidak pernah terpisah dari relasi kuasa. Dalam konteks ini, tafsir menjadi sarana untuk membentuk horizon kebenaran yang tidak berada di bawah kontrol negara. Lihat Foucault, *Power/Knowledge*, 109–133.

¹⁹ Subjektivitas HAMKA merupakan hasil dari proses historis yang melibatkan pengalaman organisasi, konflik ideologis, dan represi negara. Lihat Aljunied, *Hamka and Islam*, 70–94; Rush, *Hamka's Great Story*, 236–260.

²⁰ Michel Foucault, “The Subject and Power,” in *Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics*, ed. Hubert L. Dreyfus and Paul Rabinow (Chicago: University of Chicago Press, 1983), 208–212.

pengalaman historis HAMKA membentuk posisi epistemiknya; dan (3) dimensi etis—bagaimana kritik terhadap penyalahgunaan kekuasaan berfungsi sebagai artikulasi nilai dalam situasi pembatasan wacana. Pendekatan ini tidak mengasumsikan bentuk resistensi tertentu sejak awal, tetapi menyediakan kerangka analitis untuk menelaah bagaimana teks keagamaan beroperasi dalam relasi dengan struktur kuasa yang mengitarinya

B. Batasan Dan Rumusan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada analisis *Tafsir Al-Azhar* sebagai praktik diskursif yang beroperasi dalam konteks politik dan epistemik Demokrasi Terpimpin. Fokus penelitian tidak diarahkan pada keseluruhan isi tafsir atau kajian teologis-komparatif, tetapi pada bagian-bagian yang mengandung operasi wacana terkait produksi kebenaran, pembentukan subjek, dan kritik terhadap struktur kuasa.

Elemen biografis HAMKA hanya digunakan sejauh relevan untuk menjelaskan posisi epistemiknya sebagai penafsir, bukan sebagai rekonstruksi biografi kronologis. Penelitian ini juga tidak membahas keseluruhan perjalanan pemikiran HAMKA dalam bidang-bidang lain seperti tasawuf, sastra, atau sosial-politik, kecuali ketika aspek tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan konfigurasi wacana yang termanifestasi dalam *Tafsir Al-Azhar*.

Batasan temporal ditetapkan pada periode 1959–1966, mencakup fase konsolidasi ideologis negara, pembatasan ruang wacana publik, dan masa penahanan HAMKA. Pendekatan ini dipilih untuk menjaga konsistensi analitis

dalam memahami bagaimana teks keagamaan diproduksi, diposisikan, dan berfungsi dalam situasi ketika negara mengelola wacana secara intensif.

Secara keseluruhan, batasan-batasan tersebut dirumuskan agar penelitian tetap terarah pada tujuan utama: mengkaji *Tafsir Al-Azhar* sebagai teks yang bekerja melalui mekanisme wacana tertentu dalam relasinya dengan struktur kuasa negara, tanpa melebar menjadi kajian tematik, biografis, atau historis yang tidak terkait dengan fokus analitis penelitian. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang dijawab melalui penulisan penelitian ini:

1. Bagaimana *Tafsir Al-Azhar* membangun wacana alternatif di tengah upaya negara mengontrol rezim pengetahuan?
2. Strategi diskursif apa yang digunakan HAMKA dalam mengartikulasikan kritik terhadap mekanisme kuasa yang membatasi ruang produksi wacana?
3. Bagaimana pengalaman dan posisi sosial-politik HAMKA memengaruhi orientasi hermeneutis dan bentuk kritik yang muncul dalam *Tafsir Al-Azhar*?

C. Tujuan Dan Signifikansi

Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih tajam mengenai posisi *Tafsir Al-Azhar* dalam pertarungan wacana pada masa Demokrasi Terpimpin, dengan menekankan keterkaitannya dengan relasi kuasa, pembentukan subjek, serta perubahan struktur pengetahuan. Karena itu, penelitian ini tidak hanya membaca tafsir sebagai karya keagamaan, tetapi sebagai intervensi epistemik yang bekerja di dalam—and terhadap—

mekanisme pengendalian wacana negara. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan bagaimana *Tafsir Al-Azhar* menawarkan bentuk kebenaran yang berbeda dari narasi resmi negara pada masa Demokrasi Terpimpin, sehingga dapat dipahami sebagai *counter-discourse*.
2. Menguraikan cara HAMKA menyampaikan kritik terhadap mekanisme pengendalian wacana negara—melalui ajaran moral, peringatan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, serta penegasan kebebasan berpikir—dalam penafsirannya atas ayat-ayat Al-Qur'an.
3. Menganalisis bagaimana pengalaman hidup, jaringan intelektual, dan situasi politik yang dialami HAMKA membentuk cara ia membaca Al-Qur'an dan mengarahkan substansi kritik epistemik dalam *Tafsir Al-Azhar*.

Tujuan-tujuan ini menegaskan bahwa *Tafsir Al-Azhar* bukan sekadar teks keagamaan normatif, melainkan ruang diskursif tempat negosiasi antara subjek dan struktur kuasa berlangsung. Melalui pendekatan genealogis, penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa tafsir dapat berfungsi sebagai situs resistensi, sebagai media pembentukan subjek, dan sebagai instrumen produksi kebenaran alternatif ketika negara berupaya memonopoli horizon wacana publik.

1. Signifikansi Teoretis

Penelitian ini menawarkan kontribusi teoretis dengan menerapkan kerangka genealogis Michel Foucault dalam studi tafsir Al-Qur'an—pendekatan yang masih jarang dijalankan dalam kajian tafsir Nusantara. Dengan demikian,

penelitian ini memperluas tradisi studi hermeneutika Al-Qur'an dengan menunjukkan bagaimana tafsir dapat dianalisis sebagai praktik produksi pengetahuan yang berkelindan dengan relasi kuasa, bukan hanya sebagai penjabaran normatif terhadap teks suci.

2. Signifikansi Historis-Intelektual

Studi ini memperkaya kajian tentang HAMKA dengan menempatkan *Tafsir Al-Azhar* secara eksplisit dalam konteks sejarah politik Orde Lama: pembubaran Masyumi, pembredelan *Panji Masyarakat*, represi negara terhadap ulama modernis, dan pengalaman penjara 1964–1966. Perspektif ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana kondisi politik dan represi epistemik membentuk orientasi wacana dalam tafsir tersebut.

3. Signifikansi Akademik-Metodologis

Penelitian ini mengembangkan model analisis integratif yang memadukan hermeneutika, teori wacana, dan metode genealogis. Pendekatan ini dapat direplikasi dalam penelitian teks keagamaan lain untuk menelusuri bagaimana subjek, teks, dan kuasa saling membentuk. Dengan demikian, penelitian ini memberikan dasar metodologis baru bagi studi tafsir, politik Islam, dan kajian wacana Asia Tenggara.

4. Signifikansi Praktis-Reflektif

Dengan menunjukkan bagaimana *Tafsir Al-Azhar* memuat kritik moral dan etis terhadap penyalahgunaan kekuasaan, penelitian ini menampilkan peran teks keagamaan sebagai sumber daya intelektual dan etis untuk membaca

ulang persoalan politik dan sosial kontemporer. Temuan ini menawarkan dasar refleksi bagi masyarakat Muslim Indonesia mengenai pentingnya kemandirian moral dan kewaspadaan terhadap dominasi wacana negara.

D. Tinjauan Pustaka

Howard M. Federspiel, dalam karyanya yang sangat berpengaruh *Popular Indonesian Literature of the Qur'an*, menempatkan *Tafsir Al-Azhar* sebagai salah satu puncak perkembangan literatur keislaman modern Indonesia yang secara eksplisit ditujukan kepada publik luas. Federspiel memfokuskan analisisnya pada bagaimana HAMKA menyajikan tafsir dalam gaya bahasa komunikatif, moralistik, dan mudah diakses, sehingga berhasil menjadi jembatan antara ajaran Al-Qur'an dan masyarakat Muslim urban yang sedang mengalami transformasi sosial pada pertengahan abad ke-20. Oleh karenanya, ia melihat *Tafsir Al-Azhar* terutama sebagai karya pendidikan agama dan dakwah, bukan sebagai teks politik atau intervensi wacana.²¹

Karya Azyumardi Azra, seperti *The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia*, memberikan fondasi esensial untuk memahami posisi genealogis HAMKA dalam arus reformisme Islam global. Azra menekankan konsep *connected histories*, menunjukkan bahwa HAMKA adalah pewaris dari

²¹ Meskipun Federspiel mencatat konteks sosial-politik yang melingkupi kehidupan HAMKA, ia tidak menafsirkan tafsir ini dalam kerangka produksi kebenaran atau pertarungan kuasa. Kontribusinya bersifat deskriptif—yakni menjelaskan karakter populer dan etika publik dari tafsir—tetapi tidak menyajikan pembacaan teoretis tentang bagaimana *Al-Azhar* beroperasi sebagai *counter-discourse* terhadap hegemoni negara Orde Lama. Dalam kerangka penelitian ini, karya Federspiel menjadi fondasi sejarah yang penting untuk memahami perkembangan tafsir populer; namun, ia tidak menangkap dimensi resistensi epistemik yang menjadi fokus utama kajian genealogis Foucauldian. Lihat Federspiel, *Popular Indonesian Literature of the Qur'an*, 44–47.

jaringan intelektual transnasional yang menghubungkan Minangkabau dengan pusat pembaruan di Timur Tengah, terutama melalui transmisi pemikiran Muhammad Abduh dan Rasyid Rida. Azra berhasil menempatkan HAMKA sebagai produk dari tradisi reformisme Minangkabau sejak generasi Haji Rasul, yang menekankan rasionalitas, pemurnian akidah, dan etika modernis²²

Disertasi Wan Sabri Wan Yusof, *Hamka's Tafsir Al-Azhar: Qur'anic Exegesis as a Mirror of Social Change*, adalah salah satu kajian akademik paling substansial dan mendalam mengenai *Tafsir Al-Azhar*. Wan Sabri menelaah tafsir ini dengan menekankan bagaimana HAMKA merespons dinamika sosial Indonesia melalui interpretasi Qur'an, terutama terkait moralitas, perubahan sosial, dan isu-isu kemasyarakatan modern. Pendekatannya bersifat historis-sosiologis, berfokus pada bagaimana tafsir mencerminkan perubahan budaya dan sosial di Indonesia pada abad ke-20.²³

²² Kerangka genealogis Azra krusial untuk menempatkan HAMKA dalam tradisi reformisme, meskipun begitu ia tidak mengembangkan pembacaan *Tafsir Al-Azhar* sebagai teks politik atau intervensi dalam rezim kebenaran negara. Analisis Azra berhenti pada level transmisi ide dan transformasi tradisi, bukan pada cara tafsir diproduksi dalam kondisi represi atau digunakan sebagai praktik wacana tandingan. Dengan demikian, kontribusi Azra memperkuat konteks genealogis awal bagi penelitian ini, tetapi tidak menyentuh dimensi *counter-discourse* yang menjadi fokus utama kajian ini. Azyumardi Azra, *The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia: Networks of Malay-Indonesian and Middle Eastern 'Ulama' in the Seventeenth and Eighteenth Centuries* (Honolulu: University of Hawai'i Press, 2004), 150–155; lihat juga Azyumardi Azra, "The Transmission of al-Manar's Reformism to the Malay-Indonesian World: The Cases of al-Imam and al-Munir," *Studia Islamika* 6, no. 3 (1999): 75–79.

²³ Meskipun Wan Sabri mencatat konteks ketegangan politik saat penulisan, ia tetap membaca *Al-Azhar* sebagai representasi sosial, bukan sebagai teks yang berfungsi dalam pertarungan wacana dengan negara. Ia tidak menggunakan teori Michel Foucault, tidak menyingkap relasi kuasa yang memproduksi tafsir, dan tidak melihat penjara sebagai situs pembentukan subjek penafsir. Dengan demikian, kontribusinya sangat penting untuk memetakan dimensi sosial tafsir, tetapi tidak menangkap potensi *Al-Azhar* sebagai *counter-discourse* yang lahir dari kondisi represi politik. Lihat Wan Sabri Wan Yusof, *Hamka's Tafsir Al-Azhar: Qur'anic Exegesis as a Mirror of Social Change* (PhD diss., Temple University, 1997)

Kajian Milhan Yusuf dalam tesisnya *Hamka's Method of Interpreting the Legal Verses of the Qur'an* merupakan penelitian yang paling teknis dalam menelaah metodologi tafsir HAMKA, khususnya terkait ayat-ayat hukum. Milhan menelusuri bagaimana HAMKA memadukan pendekatan rasional, moral-etic, dan prinsip-prinsip umum syariah dalam membaca ayat hukum, serta adaptasinya terhadap metode tafsir klasik ke dalam kerangka modernisme Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah struktur metodologis *Al-Azhar*: sumber rujukan HAMKA, penggunaan *ma'tsur* dan *ra'yi*, integrasi konteks sosial, serta kecenderungan *ijtihad*-nya.²⁴

Karel Steenbrink, dalam artikelnya “*Qur'an Interpretation of Hamzah Fansuri (ca. 1600) and Hamka (1908–1982): A Comparison*,” memetakan posisi HAMKA dalam sejarah panjang tradisi tafsir Nusantara. Steenbrink menunjukkan bahwa *Tafsir Al-Azhar* menandai pergeseran epistemik dari corak sufistik-esoteris (diwakili Hamzah Fansuri) menuju penafsiran modernis yang rasional, moral, dan berorientasi pada kehidupan publik. Ia melihat HAMKA sebagai representasi gelombang pembaruan Islam yang menekankan etika sosial dan modernitas, menolak pendekatan batiniah yang spekulatif.¹

²⁴ Meskipun komprehensif dalam menjelaskan teknik hermeneutika hukum, Milhan tidak membaca tafsir sebagai produk relasi kuasa atau sebagai intervensi terhadap rezim politik. Tafsir bagi Milhan adalah karya ilmiah-hukum, bukan wacana yang beroperasi melawan hegemoni negara. Ia tidak menggunakan teori diskursus, tidak menghubungkan pengalaman penjara HAMKA dengan bentuk penafsirannya, dan tidak menempatkan *Al-Azhar* dalam kerangka *counter-discourse*. Dengan demikian, karya Milhan penting untuk memahami logika metodologis tafsir, tetapi tidak menyentuh dimensi politik epistemik yang menjadi fokus penelitian ini. Lihat Milhan Yusuf, *Hamka's Method of Interpreting the Legal Verses of the Qur'an* (MA thesis, McGill University, 1995).

Kontribusi Steenbrink terletak pada pemetaan historis-komparatif yang menempatkan HAMKA dalam evolusi intelektual Islam Nusantara.²⁵

Khairudin Aljunied, melalui monograf pentingnya *Hamka and Islam: Cosmopolitan Reform in the Malay World*, memberikan pembacaan paling teoretis dan progresif atas figur HAMKA dalam lanskap intelektual dunia Melayu. Aljunied menafsirkan HAMKA sebagai reformis kosmopolitan yang bergerak melampaui batas lokal, menggabungkan rasionalisme, spiritualitas tasawuf modern, dan komitmen etis terhadap masyarakat. Ia berhasil menempatkan HAMKA dalam jejaring transnasional, memperlihatkan bagaimana pengalaman hidup, perjumpaan gagasan global, dan dinamika politik Indonesia membentuk orientasi pemikirannya.²⁶

Mun'im Sirry, dalam artikelnya “What’s Modern about Modern Tafsir? A Closer Look at Hamka’s *Tafsir Al-Azhar*,” menyajikan pembacaan kritis terhadap klaim “kemodernan” *Tafsir Al-Azhar*. Sirry berargumen bahwa modernitas tafsir HAMKA tidak terletak pada metode historis-kritis (seperti

²⁵ Meskipun demikian, analisisnya bersifat literer-historis dan tidak menggunakan teori wacana, teori kuasa, atau pendekatan genealogis. Steenbrink tidak menyingkap bagaimana *Tafsir Al-Azhar* diproduksi dalam situasi represi, bagaimana tafsir berfungsi sebagai praktik produksi kebenaran, atau bagaimana HAMKA berposisi dalam pertarungan wacana dengan negara Orde Lama. Akibatnya, meskipun kajian ini memperjelas transformasi intelektual, ia tidak memasuki dimensi politik epistemik yang menjadi fokus utama penelitian ini. Lihat Karel Steenbrink, “Qur’an Interpretation of Hamzah Fansuri (ca. 1600) and Hamka (1908–1982): A Comparison,” *Studia Islamika* 2, no. 2 (1995): 73–95.

²⁶ Meskipun Aljunied lebih teoretis daripada para sarjana sebelumnya, analisisnya tidak berfokus pada *Tafsir Al-Azhar* sebagai teks yang diproduksi dari dalam kondisi represi dan tidak memosisikan tafsir tersebut sebagai *counter-discourse* terhadap hegemoni negara Orde Lama. Ia menggunakan teori kosmopolitanisme dan tradisi Islam untuk membaca subjektivitas HAMKA, bukan teori wacana atau genealogi Foucauldian. Aljunied hanya menyinggung penjara HAMKA dan ketegangan politik secara kontekstual, tetapi tidak mengembangkan tafsir sebagai praktik *parrhesia* atau produksi kebenaran tandingan. Dengan demikian, karya Aljunied memberikan kontribusi besar dalam memetakan horizon intelektual dan etika reformis HAMKA, namun tidak memasuki ranah politik epistemik yang menjadi inti penelitian ini. Lihat Aljunied, *Hamka and Islam*.

studi Qur'an modern di Barat atau Timur Tengah), melainkan pada penggunaan bahasa Indonesia yang komunikatif, penekanan pada moralitas publik, dan kemampuannya menjembatani tradisi Islam dengan persoalan sosial kontemporer. Sirry membaca HAMKA sebagai modernis yang lebih mengedepankan pembentukan etika masyarakat daripada inovasi metodologis radikal.²⁷

Di lingkup lokal Indonesia, Korpus kajian mengenai HAMKA dan *Tafsir Al-Azhar* sangat luas, meliputi artikel jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan buku-buku populer. Namun, literatur ini secara dominan berporos pada tiga tema besar: (1) biografi dan ketokohan HAMKA sebagai ulama modernis; (2) analisis moral, etika sosial, dan pesan dakwah dalam *Tafsir Al-Azhar*; dan (3) perbandingan metodologi tafsir HAMKA dengan mufasir lain, terutama dalam kerangka tradisional-modernis. Sebagian penelitian juga menyoroti upaya *vernacularization* pesan Al-Qur'an melalui penggunaan bahasa Indonesia baku.

Meskipun kontribusi kajian-kajian ini esensial dalam memetakan aspek moral, sosial, dan literer tafsir, mayoritas darinya tidak menggunakan kerangka teori wacana, tidak membaca tafsir dalam konteks relasi kuasa, dan tidak memasukkan pengalaman penjara 1964–1966 sebagai faktor pembentukan subjektivitas penafsir. Literatur Indonesia cenderung normatif—memuliakan

²⁷ Sirry tidak membawa *Al-Azhar* ke dalam kerangka wacana dan kekuasaan; ia tidak membahas penjara 1964–1966 sebagai situs produksi tafsir, tidak menyengkap tafsir sebagai intervensi terhadap rezim kebenaran negara, dan tidak menggunakan teori Foucauldian dalam membaca relasi subjek-pengetahuan-kuasa. Akibatnya, meskipun tulisan Sirry memperkaya perdebatan tentang karakter modernisme HAMKA, ia tetap berada dalam kerangka normatif modernisme dan belum menyentuh dimensi *counter-discourse* yang menjadi pusat penelitian ini. Lihat Sirry, "What's Modern about Modern Tafsir?," 198–211.

kekayaan tafsir HAMKA tanpa menanyakan bagaimana tafsir itu diproduksi, dalam kondisi kuasa apa ia ditulis, dan fungsi strategis apa yang ia mainkan dalam pertarungan ideologis pada masa Orde Lama. Dengan demikian, meskipun korpus penelitian Indonesia memperluas pemahaman tentang karakter moral dan metodologis HAMKA, ia belum menyentuh dimensi politik epistemik, *counter-discourse*, maupun analisis genealogis yang menjadi fokus utama penelitian ini.²⁸

Dari keseluruhan kajian yang telah dipetakan—mulai dari Howard M. Federspiel yang menekankan karakter populer *Tafsir Al-Azhar*, Azyumardi Azra yang menggarisbawahi akar genealogis reformisme Islam, hingga studi-studi lain yang menyoroti aspek sosiologis dan yuridis-metodologis (Milhan Yusuf), historis-komparatif (Steenbrink), maupun modernisme normatif dan kosmopolitan (Aljunied dan Mun'im Sirry)—dapat disimpulkan bahwa *Tafsir Al-Azhar* pada umumnya dipahami sebagai produk pemikiran keagamaan,

²⁸ Baca dan bandingkan literatur, di antaranya Eduwar, *Pemahaman Toleransi Hamka dalam Tafsir Al-Azhar* (Tesis Magister, Institut PTIQ Jakarta, 2023); Maulidi, *Konstruksi Perempuan dalam Tafsir Al-Azhar Karya Hamka* (Tesis Magister, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015); Asep Dadan Suganda, *Metode Penafsiran Teks al-Qur'an Buaya Hamka dan Quraish Shihab* (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2010); “Vernakularisasi dalam *Tafsir Al-Azhar*” (Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024); Nadya Syafa Chairunnisa, “Hedonisme dalam al-Qur'an” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024); Nor Aini, “*Tafsir Al-Azhar* Karya Hamka: Kajian Pendekatan Adabi Ijtima'i” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019); Yuyun Affandi, Azzah Luqinatul Husna, dan Mohammed Saad Alhuwaymil, “Critical Discourse Analysis dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an di Indonesia,” *Islamic Communication Journal* 9, no. 1 (June 2024): 95–110; Bukhori Abdul Shomad et al., “Implications of Hamka's Thoughts in *Tafsir Al-Azhar* on the Standpoint of Islamic Social Organization vis-à-vis the State,” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 14, no. 1 (June 2024): 91–116; Munawan, “A Critical Discourse Analysis dalam Kajian Tafsir al-Qur'an: Studi *Tafsir Al-Azhar* Karya Hamka,” *Tajdid* 25, no. 2 (2018); Anwar Mujahidin, “Tafsir Alquran dan Praktik Politik Umat Islam Indonesia Perspektif *Tafsir Al-Azhar* dan Tafsir al-Mishbah,” *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith* 7, no. 2 (2017): 375–395; Hidayati, “Metodologi Tafsir Kontekstual al-Azhar Karya Buaya Hamka,” *El-'Umdah: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir* 1, no. 1 (2018); Ahmad Levi Fachrul Avivy et al., “Isra'iliyyat in Interpretive Literature of Indonesia: A Comparison between Tafsir Marah Labid and *Tafsir Al-Azhar*,” *Mediterranean Journal of Social Sciences* 6, no. 3 (2015): 401–407.

ekspresi etika modernis, atau respons normatif terhadap perubahan sosial.

Dalam keseluruhan literatur yang berhasil ditelusuri oleh peneliti, belum ditemukan penelitian yang secara eksplisit membaca *Tafsir Al-Azhar* sebagai praktik produksi pengetahuan yang beroperasi dalam relasinya dengan konfigurasi ideologis dan epistemik negara Orde Lama.

Secara metodologis, kajian-kajian terdahulu yang tersedia belum secara sistematis mengaitkan proses penafsiran dengan relasi kuasa yang membentuknya. Pengalaman pemenjaraan HAMKA pada periode 1964–1966 umumnya diperlakukan sebagai latar biografis atau konteks historis, dan belum dianalisis sebagai arena kuasa yang secara aktif membentuk struktur subjektivitas penafsir dan horizon hermeneutikanya. Selain itu, dalam penelusuran peneliti, belum ditemukan kajian yang menggunakan pendekatan genealogis untuk menjelaskan bagaimana pengalaman politik personal tersebut berfungsi sebagai kondisi kemungkinan bagi artikulasi tafsir tertentu, ataupun yang menganalisis *Tafsir Al-Azhar* sebagai praktik diskursif yang berhadapan dengan kerangka epistemik negara seperti Nasakom dan Manipol/USDEK.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini mengambil posisi analitis dengan menawarkan pembacaan *Tafsir Al-Azhar* sebagai praktik diskursif yang beroperasi dalam medan relasi kuasa tertentu. Tafsir dipahami sebagai bentuk artikulasi pengetahuan yang tidak terlepas dari kondisi historis dan politik pembentukannya, serta sebagai ruang di mana subjektivitas penafsir dinegosiasikan. Dengan menggunakan pendekatan genealogis dan analisis wacana, penelitian ini dimaksudkan untuk melengkapi kajian-kajian yang telah

ada dengan menyoroti dimensi epistemik dan politis tafsir yang, sejauh penelusuran peneliti, belum menjadi fokus utama dalam literatur yang tersedia.

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teoretis penelitian ini dibangun dengan memanfaatkan sejumlah konsep kunci dalam pemikiran Michel Foucault, terutama konsep diskursus, rezim pengetahuan, genealogi, dan *counter-discourse*. Konsep-konsep tersebut tidak digunakan untuk membangun penilaian normatif terhadap *Tafsir Al-Azhar*, melainkan sebagai perangkat analitis untuk menelaah bagaimana teks tafsir tersebut diproduksi, beroperasi, dan memperoleh maknanya dalam konfigurasi kuasa dan pengetahuan Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin.²⁹ Dengan demikian, bagian ini tidak dimaksudkan sebagai pemaparan menyeluruh atas teori Foucault, melainkan sebagai perumusan kerangka konseptual yang relevan untuk membaca relasi antara teks tafsir, subjek penafsir, dan struktur kuasa negara yang membingkai kemunculannya.

Konsep diskursus, sebagaimana dirumuskan oleh Michel Foucault, digunakan sebagai landasan awal untuk memahami bahwa bahasa tidak bersifat netral, melainkan bekerja sebagai seperangkat praktik yang mengatur apa yang dapat dikatakan, siapa yang berhak berbicara, serta dalam kondisi apa suatu pernyataan dapat diterima sebagai benar. Dalam pengertian Foucault, diskursus tidak terbatas pada teks atau ujaran, tetapi mencakup institusi, mekanisme

²⁹ Foucault, *Power/Knowledge*, 131–133.

sosial, dan aturan implisit yang menopang produksi dan sirkulasi makna.³⁰

Kerangka diskursus ini sejalan dengan pandangan Norman Fairclough, yang menekankan bahwa bahasa merupakan praktik sosial yang selalu terikat pada relasi kuasa.³¹ Dengan kerangka tersebut, penelitian ini dapat membedakan dan membandingkan bahasa negara, bahasa ideologi revolusi, dan bahasa keagamaan sebagai sistem wacana yang hidup dalam medan yang sama, tetapi beroperasi dengan logika legitimasi dan otoritas yang berbeda.

Berangkat dari pemahaman diskursus tersebut, konsep rezim pengetahuan yang dikembangkan oleh Michel Foucault digunakan untuk menjelaskan bagaimana negara Orde Lama tidak hanya mengatur tindakan politik, tetapi juga membentuk tatanan pengetahuan yang menentukan apa yang dianggap sebagai kebenaran publik. Dalam kerangka Foucault, rezim pengetahuan merujuk pada keseluruhan mekanisme—ideologis, institusional, dan diskursif—yang mengatur produksi, legitimasi, dan distribusi kebenaran dalam masyarakat.³² Dalam konteks Demokrasi Terpimpin, analisis historis Herbert Feith menunjukkan bahwa proyek ideologis seperti Nasakom dan Manipol/USDEK berfungsi sebagai kerangka epistemik tunggal yang memusatkan otoritas kebenaran pada negara.³³ Melalui praktik sensor, pembubaran organisasi, kontrol pendidikan, dan normalisasi bahasa revolusi—

³⁰ Michel Foucault, *The Archaeology of Knowledge*, trans. A. M. Sheridan Smith (London: Routledge, 2013), 38–49.

³¹ Norman Fairclough, *Discourse and Social Change* (Cambridge: Polity Press, 1992), 63–72.

³² Foucault, *Power/Knowledge*, 109–133.

³³ Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia* (Singapore: Equinox Publishing, 2006), 530–556.

sebagaimana juga dianalisis oleh Krishna Sen dan David T. Hill serta Ariel Heryanto—negara membangun tatanan pengetahuan yang membatasi kemungkinan munculnya wacana alternatif.³⁴ Dengan konsep ini, Orde Lama diposisikan bukan semata sebagai rezim politik, melainkan sebagai rezim pengetahuan yang berpretensi mengendalikan horizon kebenaran publik.

Konsep genealogi, sebagaimana dikembangkan oleh Michel Foucault, digunakan secara terbatas untuk membaca pembentukan subjektivitas penafsir, bukan sebagai metode utama analisis teks. Dalam perspektif genealogis Foucault, subjek tidak dipahami sebagai entitas otonom dan stabil, melainkan sebagai hasil dari proses historis yang bersifat kontingen, diskontinu, dan dibentuk oleh relasi kuasa.³⁵ Melalui kerangka ini, posisi HAMKA sebagai penafsir dibaca sebagai produk interaksi antara latar pendidikan, jaringan intelektual, keterlibatan organisasi, pengalaman politik, serta tekanan dan pembatasan yang dialaminya. Pendekatan ini sejalan dengan pembacaan Khairudin Aljunied, yang menempatkan HAMKA sebagai intelektual Muslim yang terbentuk melalui negosiasi antara tradisi keislaman, jaringan kosmopolitan, dan dinamika kekuasaan negara.³⁶ Genealogi memungkinkan penelitian ini menjelaskan bagaimana pengalaman-pengalaman tersebut membentuk horizon hermeneutis HAMKA, tanpa mereduksinya menjadi penjelasan psikologis atau biografi linear.

³⁴ Sen dan Hill, *Media, Culture and Politics in Indonesia* (Melbourne: Oxford University Press, 2000), 13–45; Ariel Heryanto, *Challenging Authoritarianism in Southeast Asia: Comparing Indonesia and Malaysia* (London: Routledge, 2003), 27–56.

³⁵ Foucault, *Discipline and Punish*, 27–31.

³⁶ Aljunied, *Hamka and Islam*, 3–18, 145–167.

Berdasarkan fondasi tersebut, konsep *counter-discourse* dalam pemikiran Michel Foucault menjadi kerangka analisis utama dalam penelitian ini. *Counter-discourse* tidak dipahami sebagai perlawanan politik yang bersifat frontal, melainkan sebagai praktik wacana yang bekerja dari dalam batas-batas rezim pengetahuan, tetapi tidak sepenuhnya tunduk padanya.³⁷ Dalam pengertian ini, *counter-discourse* muncul melalui strategi penafsiran, pengaturan ulang makna, dan pemindahan sumber otoritas kebenaran. Kerangka ini memungkinkan pembacaan *Tafsir Al-Azhar* sebagai teks keagamaan yang beroperasi di dalam ruang yang diawasi negara, namun memanfaatkan celah-celah epistemik yang tidak sepenuhnya dapat dikontrol oleh mekanisme ideologis dan sensor negara—sebuah pola yang juga ditegaskan dalam kajian media dan wacana oleh Sen dan Hill.³⁸

Dengan menggunakan konsep *counter-discourse*, penelitian ini tidak mengasumsikan sejak awal bahwa *Tafsir Al-Azhar* merupakan bentuk oposisi politik eksplisit terhadap negara. Sebaliknya, tafsir dipahami sebagai praktik diskursif yang secara gradual mengintervensi klaim negara atas kebenaran, misalnya melalui pemindahan sumber legitimasi moral, penegasan otonomi etika keagamaan, serta pelemahan monopoli negara dalam menafsirkan sejarah dan arah kehidupan kolektif—sejalan dengan kerangka analisis wacana kritis yang dikembangkan oleh Ruth Wodak dan Michael Meyer.³⁹

³⁷ Foucault, *Power/Knowledge*, 100–102.

³⁸ Sen dan Hill, *Media, Culture and Politics in Indonesia*, 42–68.

³⁹ Ruth Wodak dan Michael Meyer, *Methods of Critical Discourse Analysis* (London: Sage Publications, 2001), 9–33.

Secara keseluruhan, kerangka teoretis ini membentuk satu kesatuan analitis yang saling terkait: konsep diskursus Foucault dan Fairclough menjelaskan struktur ujaran dan batas-batas makna; konsep rezim pengetahuan Foucault, yang diperkuat oleh analisis historis Feith, Sen dan Hill, serta Heryanto, memetakan mekanisme pengendalian kebenaran oleh negara; genealogi Foucault dan pembacaan Aljunied menerangkan pembentukan posisi penafsir; sementara konsep *counter-discourse* menyediakan alat utama untuk membaca bagaimana *Tafsir Al-Azhar* berfungsi sebagai wacana alternatif di tengah dominasi epistemik negara. Dengan jalinan ini, *Tafsir Al-Azhar* dapat dipahami sebagai teks yang beroperasi dalam medan kuasa tertentu—bukan sebagai karya netral, tetapi juga tidak direduksi menjadi propaganda atau perlawanan politik langsung—melainkan sebagai praktik produksi pengetahuan yang lahir dari relasi kompleks antara teks, subjek, dan struktur kuasa.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-interpretatif dengan pendekatan Genealogi-Wacana Michel Foucault sebagai perangkat analitis utama. Pilihan metodologis ini sejalan dengan tujuan penelitian untuk memahami *Tafsir Al-Azhar* bukan hanya sebagai teks keagamaan, tetapi sebagai praktik produksi wacana yang beroperasi di dalam struktur kuasa Indonesia pada masa Orde Lama. Sebagai studi kualitatif, fokus utamanya adalah menafsirkan jaringan makna, proses pembentukan subjek, dan kondisi historis yang memungkinkan munculnya *counter-discourse* di tengah hegemoni negara.

Pendekatan genealogis dipilih karena efektif dalam mengungkap ketidakterputusan (*discontinuities*), pergeseran posisi subjek, dan mekanisme kuasa-pengetahuan yang membentuk struktur hermeneutika HAMKA.⁴⁰

1. Sumber Data

a. Sumber Primer: Objek utama adalah *Tafsir Al-Azhar* karya HAMKA.

Data primer dilengkapi dengan karya-karya non-tafsir HAMKA (seperti *Kenang-Kenangan Hidup, Revolusi Ideologi, Ghirah dan Tantangan Terhadap Islam, Falsafah Hidup, dan Keadilan Sosial dalam Islam*) yang digunakan untuk menelusuri pembentukan rasionalitas, etika, dan horizon intelektual yang menopang penafsirannya.

b. Sumber Sekunder: Meliputi kajian akademik mengenai HAMKA, politik Orde Lama (1950–1965), sejarah tafsir Indonesia, teori kuasa-pengetahuan Foucault, serta studi kritis tentang relasi negara–ulama. Literatur sekunder ini berfungsi untuk menempatkan *Tafsir Al-Azhar* dalam medan wacana yang lebih luas dan untuk membangun pembacaan genealogis yang kokoh.⁴¹

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan prosedur sistematis: pembacaan intensif terhadap teks tafsir, penandaan tematik, ekstraksi pernyataan kunci, kategorisasi

⁴⁰ Michel Foucault, “Nietzsche, Genealogy, History,” dalam *Language, Counter-Memory, Practice*, ed. Donald F. Bouchard (Ithaca: Cornell University Press, 1977), 139–164.

⁴¹ Sebagai contoh sumber sekunder, lihat Federspiel, *Popular Indonesian Literature of the Qur'an*; Mortimer, *Indonesian Communism under Sukarno*; George McT. Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia* (Ithaca: Cornell University Press, 1952).

terminologi, dan identifikasi motif diskursif yang berulang. Prosedur ini disandingkan dengan penelusuran historis terhadap peristiwa politik yang secara langsung mengiringi produksi tafsir—meliputi pembubaran Masyumi, pembredelan *Panji Masyarakat*, kriminalisasi ulama modernis, hingga penahanan HAMKA pada 1964—untuk memahami kondisi produksi wacana yang melingkupi penulisan *Tafsir Al-Azhar*.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dalam empat tahapan yang saling berkaitan dan mengacu pada prinsip genealogis-wacana Foucault:

- a. Identifikasi Pernyataan Kunci (*Statement*): Dilakukan identifikasi bentuk-bentuk ujaran dalam *Tafsir Al-Azhar* yang merepresentasikan sikap HAMKA terhadap isu kekuasaan, kebebasan berpikir, otoritarianisme, moralitas publik, dan relasi agama–negara. Tahap ini mengikuti prinsip arkeologi wacana Foucault yang fokus pada aturan pembentukan pernyataan.⁴²
- b. Pemetaan Genealogis: Setiap *statement* dipetakan ke dalam konteks historis produksi tafsir, termasuk intensifikasi represi politik negara pada 1959–1965. Posisi penjara sebagai *dispositif* yang memaksa subjek melakukan rekonstruksi diri menjadi bagian integral dari pembacaan ini.⁴³

⁴² Michel Foucault, *The Archaeology of Knowledge*, trans. A. M. Sheridan Smith (London: Routledge, 2002), 54–61.

⁴³ Foucault, *Discipline and Punish*, 22–23.

- c. Penyandingan Wacana: Dilakukan penyandingan sistematis antara pernyataan tafsir dan wacana resmi negara—misalnya Nasakom, Manipol-USDEK, konsep “Demokrasi Terpimpin,” dan retorika kepemimpinan Sukarno—untuk melihat bagaimana kedua blok wacana saling menegasikan atau bersinggungan.⁴⁴
- d. Penentuan Fungsi Diskursif: Penelitian menentukan fungsi diskursif setiap pernyataan, yakni apakah ia bekerja sebagai *discourse* yang memperkuat formasi tertentu, atau sebagai *counter-discourse* yang secara strategis mengganggu struktur kebenaran yang dipaksakan Negara.

Dengan demikian, metode penelitian ini disusun secara terintegrasi untuk menyingkap bukan hanya isi *Tafsir Al-Azhar*, tetapi juga kondisi kuasa yang memungkinkan tafsir tersebut muncul, struktur epistemik yang dikerjakannya, serta efek-efek etis dan politis yang dihasilkan oleh wacana HAMKA dalam lanskap intelektual Indonesia modern. Kerangka ini memungkinkan penelitian menjelaskan bagaimana sebuah karya tafsir dapat berfungsi sebagai intervensi epistemik pada masa ketika negara berusaha memonopoli kebenaran dan membungkam wacana keagamaan alternatif.

G. Sistematika Pembahasan

Tesis ini disusun dalam lima bab yang saling berkaitan untuk menganalisis *Tafsir Al-Azhar* sebagai praktik produksi pengetahuan yang lahir

⁴⁴ Foucault, *Power/Knowledge*, 109–133.

dan beroperasi dalam konteks rezim pengetahuan Orde Lama. Struktur penulisan dirancang mengikuti logika analisis genealogis-wacana, dengan menempatkan tafsir dalam relasi dinamis antara pembentukan subjek penafsir, struktur kuasa negara, dan pertarungan wacana keagamaan di Indonesia modern.

Bab I (Pendahuluan) memaparkan landasan konseptual dan metodologis penelitian. Bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoretis, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi untuk menjelaskan posisi penelitian dan alasan mengapa *Tafsir Al-Azhar* perlu dibaca tidak semata sebagai karya tafsir normatif, melainkan sebagai teks yang diproduksi dalam konteks pengaturan wacana dan produksi kebenaran oleh negara pada masa Demokrasi Terpimpin.

Bab II membahas biografi wacana HAMKA, dengan fokus pada formasi diskursif dan pembentukan subjektivitas keilmuannya. Bab ini menggunakan kerangka genealogis untuk membaca biografi bukan sebagai narasi kronologis, melainkan sebagai medan wacana yang dibentuk oleh praktik, institusi, dan relasi kuasa. Pembahasan meliputi benturan rezim epistemik dalam lingkungan awal HAMKA, pengalaman keluarga dan pendidikan, pilihan jalur otodidak, mobilitas intelektual ke Jawa dan Mekkah, serta peran jejaring organisasi seperti Muhammadiyah, Masyumi, dan media *Panji Masyarakat*. Bab ini juga menelaah pengalaman represi negara—termasuk pembubaran organisasi dan penahanan—sebagai momen penting dalam transformasi subjektivitas

hermeneutika HAMKA. Dengan demikian, Bab II memetakan bagaimana otoritas penafsiran HAMKA terbentuk melalui negosiasi antara tradisi, institusi modernis, jejaring transnasional, dan tekanan politik.

Bab III menganalisis Orde Lama sebagai rezim pengetahuan. Fokus utama bab ini adalah bagaimana negara pada masa Demokrasi Terpimpin membangun tatanan kebenaran ideologis melalui Nasakom, Manipol/USDEK, klasifikasi politik “revolusioner–kontra-revolusi”, sensor media, pengendalian pendidikan, serta penataan wacana keagamaan. Bab ini menunjukkan bahwa kekuasaan negara bekerja tidak hanya secara represif, tetapi juga secara epistemik, dengan mengatur siapa yang boleh berbicara, apa yang dapat dikatakan, dan dalam kerangka apa kebenaran dapat diakui. Melalui studi kasus HAMKA—mulai dari kooptasi, pembungkaman, hingga penahanan—Bab III menjelaskan bagaimana mekanisme kuasa negara mengubah lokasi dan bentuk produksi wacana, sekaligus membuka celah epistemik yang memungkinkan bertahannya wacana non-negara.

Bab IV merupakan bagian analisis utama yang membahas *Tafsir Al-Azhar* sebagai *counter-discourse*. Bab ini mengkaji bagaimana tafsir berfungsi sebagai praktik diskursif yang lahir di dalam rezim pengetahuan Orde Lama, tetapi tidak sepenuhnya tunduk pada mekanisme kontrol negara. Analisis difokuskan pada posisi material dan epistemik tafsir, peran penjara sebagai ruang pemindahan wacana dari ranah publik ke privat, serta tiga poros resistensi epistemik utama: pemindahan kedaulatan sejarah dari negara kepada Tuhan, pemulihan transparansi kebenaran melawan kooptasi pengetahuan, dan

delegitimasi moral terhadap kolaborator kekuasaan. Melalui pembacaan dekat atas ayat-ayat kunci, Bab IV menunjukkan bagaimana tafsir bekerja sebagai produksi pengetahuan alternatif yang menantang monopoli negara atas kebenaran, tanpa tampil sebagai oposisi politik eksplisit.

Bab V (Kesimpulan) merangkum temuan-temuan utama penelitian mengenai relasi antara tafsir, subjektivitas penafsir, dan rezim pengetahuan negara. Bab ini menegaskan kontribusi teoretis penelitian dalam memperluas kajian tafsir Al-Qur'an melalui pendekatan genealogis-wacana, serta menunjukkan implikasi metodologisnya bagi studi pemikiran Islam Indonesia dan analisis hubungan antara agama, pengetahuan, dan kekuasaan. Bab ini juga mengajukan refleksi dan kemungkinan arah penelitian lanjutan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa *Tafsir Al-Azhar* tidak dapat direduksi menjadi karya tafsir normatif yang berdiri di luar sejarah, melainkan harus dipahami sebagai praktik produksi pengetahuan yang beroperasi di dalam konfigurasi kekuasaan tertentu. *Tafsir* ini lahir dan bekerja dalam rezim pengetahuan Orde Lama pada masa Demokrasi Terpimpin, suatu tatanan epistemik yang tidak hanya mengatur tindakan politik dan institusi negara, tetapi juga menetapkan kondisi kemungkinan bagi kebenaran: apa yang boleh diketahui, siapa yang berhak berbicara, dan melalui bahasa apa suatu pernyataan dapat beredar sebagai pengetahuan yang sah. Dalam konteks tersebut, *Tafsir Al-Azhar* hadir bukan sebagai respons teologis yang netral, melainkan sebagai intervensi epistemik terhadap klaim negara atas monopolisasi kebenaran, sejarah, dan legitimasi moral.

Dengan menggunakan pendekatan genealogis Michel Foucault, penelitian ini menunjukkan bahwa rezim pengetahuan Orde Lama bekerja melalui mekanisme normalisasi, klasifikasi ideologis, dan pengendalian medan ujaran, terutama melalui doktrin Manipol/USDEK, sintesis Nasakom, sensor media, serta birokratisasi agama. Namun, pembacaan genealogis juga memperlihatkan batas internal rezim tersebut. Rigiditas ideologi negara, ambivalensi ruang keagamaan, fokus pengawasan pada media publik, serta

ketidakmampuan negara menjangkau genre diskursif non-periodik dan ruang privat menciptakan retakan-retakan epistemik yang tidak dapat ditutup oleh mekanisme kekuasaan. Retakan inilah yang menyediakan kondisi material dan epistemik bagi keberlangsungan produksi pengetahuan non-negara, di mana *Tafsir Al-Azhar* mengambil posisinya.

Temuan utama penelitian ini adalah bahwa *Tafsir Al-Azhar* berfungsi sebagai counter-discourse terhadap rezim pengetahuan Orde Lama, bukan melalui oposisi politik langsung atau kritik administratif terhadap negara, melainkan melalui rekonstruksi tatanan epistemik itu sendiri. *Tafsir HAMKA* mengoperasikan resistensi pada tingkat yang lebih fundamental: ia memindahkan pusat kebenaran dari negara kepada kedaulatan ilahi, dari ideologi revolusioner kepada etika Qur’ani, dan dari legitimasi politik kepada integritas moral. Dalam proses ini, tafsir tidak menolak kekuasaan secara frontal, tetapi merongrong klaim epistemiknya—yakni klaim negara untuk mendefinisikan sejarah, moralitas publik, dan batas kebenaran.

Penelitian ini mengidentifikasi tiga mekanisme resistensi epistemik yang konsisten dalam *Tafsir Al-Azhar*. Pertama, *epistemic displacement*, yaitu pemindahan locus sejarah dari konstruksi ideologis negara ke dalam hukum ilahi, yang secara sistematis menggugurkan mitos teleologi politik dan klaim negara sebagai pengendali arah sejarah. Kedua, *discursive autonomy*, yakni produksi ujaran moral-teologis yang tidak dapat dipetakan ke dalam kategori “revolusioner/kontra-revolusioner,” sehingga beroperasi di luar jangkauan sensor dan normalisasi negara. Ketiga, *moral counter-legitimation*, yaitu

pembongkaran kredibilitas epistemik para kolaborator kekuasaan—ulama dan intelektual negara—melalui pemulihan standar etik ulama independen sebagai *waratsah al-anbiyā'*. Ketiga mekanisme ini bekerja secara simultan untuk merusak fondasi pengetahuan yang menopang legitimasi rezim, tanpa harus mengartikulasikan oposisi politik eksplisit.

Lebih jauh, penelitian ini menunjukkan bahwa *Tafsir Al-Azhar* tidak hanya menghasilkan wacana tandingan, tetapi juga membentuk subjektivitas hermeneutis alternatif. *Tafsir HAMKA* memproduksi subjek beriman yang tidak tunduk pada politik ketakutan, tekanan mayoritas, atau klasifikasi ideologis negara. Subjek ini dibentuk melalui internalisasi etika Qur'ani yang menempatkan kejujuran epistemik, keberanian moral, dan ketaatan spiritual di atas loyalitas politik. Dalam kerangka Foucauldian, proses ini dapat dipahami sebagai counter-subjectivation, yakni pembentukan subjek yang menolak model subjek patuh dan terdisiplin yang diproduksi oleh rezim pengetahuan negara.

Dengan demikian, *Tafsir Al-Azhar* harus diposisikan sebagai institusi produksi pengetahuan non-negara, sebuah domain epistemik yang mampu menghasilkan makna, horizon moral, dan orientasi historis secara mandiri, terlepas dari otoritas politik yang sedang berkuasa. *Tafsir* ini menunjukkan bahwa kekuasaan, betapapun represif dan terinstitusionalisasi, tidak pernah sepenuhnya menutup kemungkinan berpikir dan berbicara. Dalam konteks Demokrasi Terpimpin, *Tafsir Al-Azhar* menjadi arsip epistemik yang merekam sekaligus menantang rezim pengetahuan negara, dan dengan demikian

memberikan kontribusi penting bagi pemahaman relasi antara tafsir, kekuasaan, dan produksi pengetahuan dalam sejarah intelektual Islam Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan implikasi teoretis penelitian ini, beberapa arah pengembangan kajian dapat diajukan sebagai agenda intelektual lanjutan, bukan sekadar rekomendasi administratif.

Pertama, penelitian ini membuka kebutuhan mendesak untuk mengintegrasikan studi tafsir Al-Qur'an dengan analisis kekuasaan dan rezim pengetahuan. Selama ini, kajian tafsir di Indonesia cenderung bergerak dalam dua kutub yang terpisah: pendekatan normatif-teologis yang memusatkan perhatian pada makna ayat, dan pendekatan historis-deskriptif yang berhenti pada konteks sosial penafsir. Penelitian ini menunjukkan bahwa kedua pendekatan tersebut belum memadai untuk menjelaskan bagaimana tafsir bekerja sebagai praktik produksi pengetahuan. Oleh karena itu, penelitian lanjutan perlu secara sistematis mengembangkan metodologi tafsir kritis yang membaca teks keagamaan sebagai praktik diskursif yang beroperasi dalam medan kuasa tertentu, tanpa mereduksinya menjadi propaganda politik ataupun doktrin normatif ahistoris.

Kedua, temuan mengenai *Tafsir Al-Azhar* sebagai *counter-discourse* menuntut perluasan objek kajian ke karya-karya keagamaan lain yang lahir dalam situasi represi politik. Kajian komparatif terhadap tafsir, fatwa, risalah keagamaan, atau tulisan ulama pada masa Orde Lama, Orde Baru, maupun

periode otoritarian di dunia Muslim akan memungkinkan pemetaan pola-pola resistensi epistemik yang lebih luas. Perbandingan semacam ini penting untuk membedakan antara resistensi yang bersifat sporadis dan resistensi yang terstruktur secara epistemik, serta untuk menguji sejauh mana temuan penelitian ini memiliki daya jelajah teoretis di luar kasus HAMKA.

Ketiga, penelitian ini menyarankan perlunya pergeseran fokus dari produksi teks ke proses resepsi dan sirkulasi wacana. Tesis ini menempatkan tafsir sebagai praktik produksi pengetahuan, tetapi belum secara mendalam menelaah bagaimana tafsir tersebut dibaca, ditafsirkan ulang, dan digunakan oleh komunitas pembacanya dalam berbagai konteks historis. Studi resepsi akan memperlihatkan bagaimana *counter-discourse* tidak hanya dibentuk oleh penulis teks, tetapi juga dinegosiasikan oleh pembaca dalam ruang sosial yang berbeda. Pendekatan ini akan memperkaya analisis tentang bagaimana tafsir berfungsi sebagai sumber pembentukan kesadaran moral dan politik umat.

Keempat, dari sisi teoretis, penelitian ini membuka ruang dialog yang lebih intens antara pemikiran Michel Foucault dan teori-teori lain dalam studi Islam kontemporer, khususnya pemikiran Antonio Gramsci, Talal Asad, serta kajian postkolonial. Integrasi lintas-teori ini penting untuk menghindari reduksionisme, baik yang mengabsolutkan kekuasaan negara maupun yang mengidealisisasi otonomi agama. Pengembangan kerangka teoretis semacam ini akan memperkuat posisi studi Islam Indonesia dalam percakapan global mengenai relasi agama, pengetahuan, dan kekuasaan.

Kelima, secara metodologis, penelitian ini mendorong agar kajian Islam Indonesia meninggalkan asumsi bahwa teks keagamaan selalu berada di luar politik, sekaligus menghindari anggapan sebaliknya bahwa teks keagamaan hanyalah instrumen politik. Pendekatan genealogis yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tafsir dapat berfungsi sebagai ruang epistemik yang otonom secara relatif—tidak sepenuhnya bebas dari kuasa, tetapi juga tidak sepenuhnya tunduk padanya. Kesadaran metodologis ini penting untuk membangun studi Islam yang lebih reflektif, kritis, dan sensitif terhadap kompleksitas sejarah.

Akhirnya, penelitian ini menyarankan agar *Tafsir Al-Azhar* tidak hanya dibaca sebagai warisan intelektual HAMKA, tetapi sebagai arsip epistemik yang merekam dinamika relasi antara agama dan kekuasaan di Indonesia. Membaca tafsir sebagai arsip semacam ini memungkinkan penelitian-penelitian selanjutnya untuk menggali kembali peran teks keagamaan dalam membentuk ruang kebenaran alternatif, terutama dalam situasi di mana negara berupaya memonopoli produksi pengetahuan. Dengan demikian, kajian terhadap tafsir tidak berhenti pada kepentingan filologis atau teologis, tetapi berkontribusi langsung pada pemahaman kritis tentang sejarah intelektual dan politik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Taufik. *Gerakan Kaum Muda di Sumatera Barat*. Jakarta: LP3ES, 1985.
- Aljunied, Khairudin. *Hamka and Islam: Cosmopolitan Reform in the Malay World*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2018.
- Asad, Talal. *Genealogies of Religion: Discipline and Reasons of Power in Christianity and Islam*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1993.
- Azra, Azyumardi. *Islam in the Indonesian World: An Account of Institutional Formation*. Bandung: Mizan, 2006.
- _____. *Islam Reformis: Dinamika Intelektual dan Gerakan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999.
- _____. *Islam Substantif*. Bandung: Mizan, 2000.
- _____. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Jakarta: Kencana, 2004.
- _____. *The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia: Networks of Malay-Indonesian and Middle Eastern ‘Ulama’ in the Seventeenth and Eighteenth Centuries*. Honolulu: University of Hawai‘i Press, 2004.
- Barton, Greg. *Gus Dur: The Authorized Biography*. Jakarta: Equinox Publishing, 2002.
- Chakrabarty, Dipesh. *Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2000.
- Dabashi, Hamid. *Post-Orientalism: Knowledge and Power in Time of Terror*. New Brunswick: Transaction Publishers, 2009.
- Daya, Burhanuddin. *Gerakan Pembaruan Pemikiran Islam: Kasus Sumatera Thawalib*. Jakarta: Rajawali, 1990.
- Dobbin, Christine. *Islamic Revivalism in a Changing Peasant Economy: Central Sumatra, 1784–1847*. London: Curzon Press, 1983.
- Eribon, Didier. *Michel Foucault*. Cambridge: Harvard University Press, 1991.
- Fedderspiel, Howard M. *Popular Indonesian Literature of the Qur'an*. Ithaca, NY: Cornell Modern Indonesia Project, 1994.

- Feith, Herbert. *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Singapore: Equinox Publishing, 2006.
- Fealy, Greg, dan M.C. Ricklefs, eds. *Religion and Practical Politics in Indonesia*. Singapore: ISEAS, 1996.
- Foucault, Michel. *The Archaeology of Knowledge*. Diterjemahkan oleh A. M. Sheridan Smith. London: Routledge, 2013.
- _____. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. Diterjemahkan oleh Alan Sheridan. New York: Vintage Books, 1995.
- _____. *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972–1977*. Diedit oleh Colin Gordon. New York: Pantheon, 1980.
- _____. *Society Must Be Defended*. New York: Picador, 2003.
- Gramsci, Antonio. *Selections from the Prison Notebooks*. New York: International Publishers, 1971.
- Hamka. *Keadilan Sosial dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2000.
- _____. *Kedudukan Wanita dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.
- _____. *Kenang-Kenangan Hidup*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- _____. *Kenang-kenangan Hidup*. Vol. 1. Depok: Gema Insani, 2020.
- _____. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.
- _____. *Tasawuf Modern*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990.
- Hamka, Rusydi. *Ayah... Kisah Hidup Buaya Hamka*. Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Heryanto, Ariel. *Challenging Authoritarianism in Southeast Asia: Comparing Indonesia and Malaysia*. London: Routledge, 2003.
- Kahin, George McT. *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press, 1952.
- Legge, John D. *Sukarno: A Political Biography*. New York: Praeger, 1972.
- Mortimer, Rex. *Indonesian Communism under Sukarno: Ideology and Politics, 1959–1965*. Ithaca: Cornell University Press, 1974.
- Nakamura, Mitsuo. *The Crescent Arises over the Banyan Tree: A Study of the Muhammadiyah Movement in an Indonesian Town*. Singapore: ISEAS Publishing, 2012.
- Noer, Deliar. *Partai Islam di Pentas Nasional*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2000.

- Noer, Deliar. *The Modernist Muslim Movement in Indonesia, 1900–1942*. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1973.
- Rush, James R. *Hamka's Great Story: A Master Writer's Vision of Islam for Modern Indonesia*. Singapore: ISEAS–Yusof Ishak Institute, 2016.
- Sen, Krishna, dan David T. Hill. *Media, Culture and Politics in Indonesia*. Melbourne: Oxford University Press, 2000.
- Thohir, Ajid. *Gerakan Modern Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Turmudi, Endang. *Islam and the State in Indonesia*. Singapore: ISEAS, 1996.
- Wodak, Ruth, dan Michael Meyer. *Methods of Critical Discourse Analysis*. London: Sage Publications, 2001.

Artikel Jurnal dan Artikel Buku

- Avivy, Ahmad Levi Fachrul, et al. “Isra’iliyyat in Interpretive Literature of Indonesia: A Comparison between *Tafsir Marah Labid* and *Tafsir Al-Azhar*.” *Mediterranean Journal of Social Sciences* 6, no. 3 (2015): 401–407.
- Benjamin, Walter. *On the Concept of History* (1940). Dalam *Selected Writings, Volume 4: 1938–1940*, diedit oleh Howard Eiland dan Michael W. Jennings, 389–400. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2003.
- Bukhori Abdul Shomad, et al. “Implications of Hamka’s Thoughts in *Tafsir Al-Azhar* on the Standpoint of Islamic Social Organization vis-à-vis the State.” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 14, no. 1 (Juni 2024): 91–116.
- Evers, Hans-Dieter. “Nusantara: History of a Concept.” *Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society* 89, no. 1 (2016): 3–14.
- Foucault, Michel. “Nietzsche, Genealogy, History.” Dalam *Language, Counter-Memory, Practice*, diedit oleh Donald F. Bouchard, 139–164. Ithaca: Cornell University Press, 1977.
- _____. “The Subject and Power.” *Critical Inquiry* 8, no. 4 (1982): 777–795.
- _____. “The Subject and Power.” Dalam *Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics*, diedit oleh Hubert L. Dreyfus dan Paul Rabinow, 208–212. Chicago: University of Chicago Press, 1983.

- _____. “Technologies of the Self.” Dalam *Technologies of the Self: A Seminar with Michel Foucault*, dedit oleh Luther H. Martin et al., 16–49. Amherst: University of Massachusetts Press, 1988.
- Harmonedi. “Perguruan Thawalib Padang Panjang In The Perspective of Educational History 1912 – 1926.” *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya* Vol. 6, No 1 (Mei 2020): 33–54.
- Hidayati. “Metodologi Tafsir Kontekstual al-Azhar Karya Buya Hamka.” *El-'Umdah: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir* 1, no. 1 (2018).
- Mujahidin, Anwar. “Tafsir Alquran dan Praktik Politik Umat Islam Indonesia Perspektif *Tafsir Al-Azhar* dan *Tafsir al-Mishbah*.” *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith* 7, no. 2 (2017): 375–395.
- Saar, Martin. “Genealogy and Subjectivity.” *European Journal of Philosophy* 10, no. 2 (2002): 231–245.
- Shofa I. K., dan Chairinisa P. E. “Polygamy in Minangkabau Tafsir: A Comparative Study of the Thoughts of Sulaiman Ar-Rasuli and Buya Hamka.” *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 11, no. 2 (2023): 223–245.
- Sirry, Mun'im. “What's Modern about Modern Tafsir? A Closer Look at Hamka's *Tafsir Al-Azhar*.” Dalam *The Qur'an in the Malay-Indonesian World: Context and Interpretation*, dedit oleh Majid Daneshgar, Peter G. Riddell, dan Andrew Rippin, 198–211. New York: Routledge, 2016.
- Steenbrink, Karel. “Qur'an Interpretation of Hamzah Fansuri (ca. 1600) and Hamka (1908–1982): A Comparison.” *Studia Islamika* 2, no. 2 (1995): 73–95.
- Taylor, Chloë. “Foucault and Familial Power.” *Hypatia* 27, no. 1 (2012).
- Westerink, Herman. “Thinking Spirituality Differently: Michel Foucault on Spiritual Self-Practices, Counter-Conducts, and Power-Knowledge Constellations.” *Religions* 10, no. 2 (2019): 1–12.
- Yuyun Affandi, Azzah Luqinatul Husna, dan Mohammed Saad Alhuwaymil. “Critical Discourse Analysis dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an di Indonesia.” *Islamic Communication Journal* 9, no. 1 (Juni 2024): 95–110.

Disertasi, Tesis, Skripsi dan Sumber Daring

Chairunnisa, Nadya Syafa. "Hedonisme dalam al-Qur'an (Studi Analisis *Tafsir Al-Azhar* dengan Hermeneutika Paul Ricoeur)." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

Eduwar. *Pemahaman Toleransi Hamka dalam Tafsir Al-Azhar*. Tesis Magister, Institut PTIQ Jakarta, 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. S.v. "nusantara." Diakses 25 September 2025.
<https://kbbi.web.id/nusantara>.

Maulidi. *Konstruksi Perempuan dalam Tafsir Al-Azhar Karya Hamka (Studi atas Penafsiran Teks-teks Gender)*. Tesis Magister, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

Munawan. "A Critical Discourse Analysis dalam Kajian Tafsir al-Qur'an: Studi *Tafsir Al-Azhar Karya Hamka*." *Tajdid* 25, no. 2 (2018).

Nor Aini. "Tafsir Al-Azhar Karya Hamka: Kajian Pendekatan Adabi Ijtimā'i." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Suganda, Asep Dadan. *Metode Penafsiran Teks al-Qur'an Buaya Hamka dan Quraish Shihab*. Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2010.

Wan Yusof, Wan Sabri. *Hamka's Tafsir Al-Azhar: Qur'anic Exegesis as a Mirror of Social Change*. PhD diss., Temple University, 1997.

"Vernakularisasi dalam *Tafsir Al-Azhar* (Studi Analisis Ayat-ayat Amar Ma'rūf Nahi Munkar)." Skripsi, Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024.

Yusuf, Milhan. *Hamka's Method of Interpreting the Legal Verses of the Qur'an*. MA thesis, McGill University, 1995.